

INTISARI

Pelaksanaan TSP di Bojonegoro yang dimulai pada tahun 2007 melalui program pembangunan infrastruktur publik berbasis kawasan oleh ExxonMobil Cepu Limited, menandai dinamika tentang pola tata kelola TSP dan desain kebijakannya. Tim Fasilitasi TSP menjadi wujud akomodasi kepentingan Pemerintah daerah, Perusahaan/Korporasi dan Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil yang pada periode sebelumnya bertarung mendesakkan konsep masing-masing.

Namun pola tata kelola dan desain kebijakan TSP ini secara signifikan berubah saat kepemimpinan Pemerintah Daerah Bojonegoro di bawah Bupati Anna Mu'awanah. Desain kebijakan yang lebih dikenal sebagai satu pintu kebijakan Bupati, mengubah mulai dari sisi perencanaan, implementasi hingga mitra pelaksana program TSP. Hal yang nampak seperti persetujuan usulan program berasal dari satu pintu yakni dari Bupati, sementara sebelumnya tidak ada ketentuan seperti itu. Hal lain adalah jangkauan objek sasaran menjadi lebih luas secara wilayah maupun institusi. Selanjutnya secara kemitraan, adalah pelibatan organisasi kemasyarakatan seperti Ansor dan Fatayat NU selain LSM yang sebelumnya mendominasi jenis lembaga yang menjadi mitra pelaksana program TSP. Fenomena perubahan tata kelola TSP tersebut menarik untuk diteliti, terutama pada kepentingan Bupati menata kelola TSP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran desain kebijakan yang dilakukan Bupati Kabupaten Bojonegoro dalam program TSP di Bojonegoro sehingga mampu meningkatkan jaringan politik elektoral yang dimiliki Bupati Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana implikasi desain kebijakan menggunakan program TSP yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro terhadap pembangunan jaringan politik (klientelisme) untuk memenangkan pemilu Kabupat Bojonegoro tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perubahan desain kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro dalam pengelolaan program TSP. Perubahan tersebut dilakukan dengan skema pembagian TSP kepada seluruh wilayah yang ada di Bojonegoro. Desain ini diberlakukan dengan dalih pemerataan, percepatan dan sinkronisasi pembangunan daerah. Ada peranan yang sangat signifikan dilakukan oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah dalam penentuan kebijakan TSP, seperti penentuan menu program, wilayah yang akan menjadi sasaran program dan intervensi pelaksanaan pembagian TSP. Dan terdapat upaya pengembangan jaringan klientelisme yang dilakukan Bupati Bojonegoro sebagai upaya peningkatan elektoralnya, pada desain TSP ini di optimalkan pelibatan aktor maupun institusi atau lembaga yang menjadi agen dalam relasinya dengan masyarakat sebagai klien.

Kata kunci : Tata kelola, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Politik Elektoral.

ABSTRAK

The implementation of CSR in Bojonegoro, which began in 2007 through the area-based public infrastructure development program by ExxonMobil Cepu Limited, marks the dynamics of the pattern of CSR governance and policy design. The CSR Facilitation Team is a form of accommodation for the interests of local governments, companies / corporations and the Alliance of Civil Society Organizations which in the previous period fought to push their respective concepts.

However, the governance pattern and design of this CSR policy significantly changed during the leadership of the Bojonegoro Regional Government under the Regent of Anna Mu'awanah. The policy design, better known as the Regent's one door policy, changed from the planning side to implementation to the implementing partners of the CSR program. It seems that the approval of the proposed program comes from one door, namely from the Regent, while previously there was no such provision. Another thing is that the reach of the target object becomes wider both regionally and institutionally. Furthermore, in partnership, is the involvement of community organizations such as Ansor and Fatayat NU in addition to NGOs that previously dominated the types of institutions that became partners in implementing the CSR program. The phenomenon of changes in CSR governance is interesting to study, especially in the interest of the Regent in managing CSR.

This study aims to determine the description of the policy design carried out by the Regent of Bojonegoro Regency in the CSR program in Bojonegoro so as to increase the electoral political network owned by the Regent of Bojonegoro Regency. This study is also to find out how the implications of policy design using the CSR program carried out by the Regent of Bojonegoro Regency on the development of political networks (clientelism) to win the Bojonegoro Regency election in 2024. This study uses descriptive qualitative research methods, using data collection techniques in the form of observations, interviews, and documentation.

The results of this study concluded that there was a change in policy design carried out by the Regent of Bojonegoro in managing the CSR program. The change was made with a CSR distribution scheme to all areas in Bojonegoro. This design was implemented under the pretext of equitable distribution, acceleration and synchronization of regional development. There is a very significant role carried out by the Regent of Bojonegoro Anna Mu'awanah in determining CSR policies, such as determining the program menu, areas that will become program targets and interventions for implementing CSR distribution. And there is an effort to develop a clientelism network carried out by the Regent of Bojonegoro as an effort to improve his electoral, in this CSR design it is optimized to involve actors and institutions or institutions that become agents in their relations with the community as clients.

Keywords: Governance, Corporate Social Responsibility, Electoral Politics.